

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar atau kurang lebih 78 % penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan (Menteri KLH, 1984, h. 9). Mereka pada umumnya atau kurang lebih 70,3 % hidup dari usaha pertanian (BPS, 1982, h. 47) dan oleh karena itu maka lahan pertanian merupakan sumber utama kehidupan mereka. Dapat dikatakan bahwa:

Pada umumnya penduduk pedesaan di Indonesia... apabila ditinjau dari segi kehidupannya sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah, earth-bound... Cara-cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien, karena belum dikenalnya mekanisasi dalam pertanian. Biasanya mereka bertani semata-mata untuk mencukupi kehidupannya sendiri dan tidak untuk dijual. Cara bertani demikian lazimnya dinamakan subsistence farming. Mereka merasa puas apabila kebutuhan keluarga telah dicukupinya (Soerjono Soekanto, 1982, h. 147).

Keadaan di atas menggambarkan bahwa penduduk pedesaan di Indonesia pada umumnya masih relatif rendah tingkat pengetahuannya serta keterampilannya, khusus di bidang teknologi pertanian.

Dalam pada itu, dan ini terutama berlaku bagi sebagian besar penduduk pedesaan di P. Jawa, disebabkan penambahan penduduk yang sangat cepat, maka lahan pertanian yang dimiliki tiap keluarga makin lama makin sempit, sedangkan kebutuhan hidup, terutama pangan, terus meningkat. Pada tahun 1980 misalnya, terdapat 72,69 % rumah tangga di P. Jawa yang mengusahakan tanah pertanian kurang dari 0,5 ha (BPS, 1981, h. 32). Hal tersebut memaksa para petani di pedesaan untuk mencari sumber penghasilan

tambahan di bidang pertanian, di antaranya dengan cara mengolah lahan baru yang kerap kali tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian ditinjau dari segi ekonomi maupun ekologi, misalnya pada daerah-daerah yang miring sampai sangat miring atau pada kawasan hutan lindung.

Lahan pertanian yang telah ada pun, sehubungan dengan kondisi para petani sebagaimana dikemukakan di atas, ditambah masih rendahnya kesadaran akan lingkungan, kebanyakan digarap tanpa memperhatikan cara-cara bertani yang baik dan tanpa menghiraukan keseimbangan lingkungan hidup. Akibatnya sudah bisa kita bayangkan. Lahan pertanian rusak akibat erosi, tanah longsor dan sebagainya. Dengan demikian selain bertambah sempit, maka lahan pertanian tersebut juga bertambah tandus.

Memang di antara rendahnya tingkat pengetahuan dan gejala kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia, boleh dikatakan saling berkaitan, jalin menjalin satu dengan lainnya. Karena faktor kebodohan, menyebabkan cara kerja para petani kurang efektif dan efisien, sehingga hasil pertanian yang diperoleh menjadi kurang. Karena hasil pertanian yang diperoleh kurang, maka mereka jatuh miskin.

Sebaliknya karena situasi kehidupan yang serba miskin, mengakibatkan sulitnya biaya untuk memperoleh pengetahuan tertentu yang lebih maju, misalnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu bahan pangan turut menentukan kualitas sumber daya manusia, terutama kecerdasannya. Manusia yang cerdas dan energik akan tercipta, manakala kebutuhan akan gizi bisa

terpenuhi. Kekurangan gizi sebagai akibat gejala kemiskinan, dapat membawa ke arah rendahnya tingkat kecerdasan seseorang (Sunarto Ndatu Mursito, 1983, h. 390).

Sebagai ilustrasi dari keadaan di atas, dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1980, kurang lebih 30 % penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 37 % relatif bergizi rendah (Laporan Bank Dunia, 1982); sedangkan :

... menurut Biro Pusat Statistik diketahui bahwa pada tahun 1976 terdapat sebesar 71,7 persen penduduk pedesaan Jawa ... masih hidup di bawah garis kemiskinan. Khususnya untuk penduduk golongan petani, diketahui bahwa sebesar 80,4 persen di pedesaan Jawa masih hidup di bawah garis kemiskinan (Sunarto Ndatu Mursito, 1982, h. 1051).

Dari 80,4 % golongan petani di P.Jawa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, kurang lebih 47,5 % termasuk golongan miskin (pendapatan 320 kg beras per tahun / capita), 32,3 % miskin sekali (pendapatan 240 kg beras per tahun / capita) dan 20,2 % paling miskin (pendapatan 180 kg beras per tahun / capita).

Kemudian pada tahun 1980, kurang lebih 28 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas, masih buta huruf Latin dan kurang lebih 85 % dari seluruh jumlah penduduk Indonesia tidak / belum tamat SD dan tamat SD (BPS, 1982, h. 16, 22). Sebagian besar dari mereka terdapat di daerah pedesaan.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1979, h. 5), penduduk pedesaan itu tidak hanya dilanda syndrome kemiskinan, tapi juga syndrome inertia (kelambanan), yang keduanya merupakan masalah

pokok yang perlu segera dipecahkan dalam usaha pembangunan pedesaan.

Syndrom kemiskinan di pedesaan mempunyai kompleks dimensi-dimensi yang saling berkaitan dan saling memperkuat: produktivitas rendah, pengangguran, tuna tanah, kurang gizi, morbiditas tinggi, buta huruf, dan sebagainya... Syndrom inerti berakar pada passivisme, fatalisme, terarah ke dalam, serba patuh, ketergantungan dan sebagainya (Sartono Kartodirdjo, 1979, h. 5).

Timbulnya kedua syndrome tersebut, menurut Sartono Kartodirdjo, disebabkan antara lain oleh kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah pedesaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, struktur sosial yang sering masih bersifat feodal, sikap dan sistem kepercayaan yang masih bersifat tradisional.

Gejala kemiskinan yang menimpa sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia tadi dapat kita perhatikan antara lain dari tingkat pendapatannya yang rendah, seperti apa yang dikemukakan oleh Ismawan (1984, h. 6): "... masalah pedesaan di Indonesia, terutama di Jawa... adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Gambaran nyata kemiskinan dan keterbelakangan adalah ... pendapatan mayoritas penduduk pedesaan yang rendah."

Sehubungan dengan tingkat pendapatan yang rendah, maka masalah yang dihadapi penduduk pedesaan adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sedemikian rupa sehingga kebutuhan pokok mereka tetap dapat terpenuhi. Terutama kebutuhan akan pangan, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, sedangkan satu-satunya harapan sebagai sumber pangan adalah lahan pertanian yang mereka

miliki, yang kondisinya, sebagaimana telah diutarakan di atas, selain sempit juga sudah kurang produktif lagi.

Di sisi lain, dan hal ini telah sama-sama kita ketahui, berhubung potensi sumber daya alam maupun manusia di Indonesia sebagian besar ada di daerah pedesaan, maka daerah pedesaan dianggap sebagai basis pembangunan di Indonesia;

... daerah pedesaan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dan strategis bagi dasar pembangunan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya maupun bidang pertahanan dan keamanan nasional (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI, 1985, h. 851).

Dengan demikian tingkat keberhasilan pembangunan di daerah pedesaan, sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sementara daerah pedesaan dianggap sebagai sumber potensial bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia, sedang di pihak lain daerah pedesaan masih dihindangi beberapa syndrome sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka GBHN RI Tahun 1983 menandakan bahwa perhatian yang sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa (Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR, 1983, h. 110).

Pembangunan daerah pedesaan terutama ditujukan untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada di daerah tersebut, termasuk sumber daya alamnya. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada, diantaranya dilakukan melalui usaha intensifikasi pemanfaatan lahan, baik lahan kering maupun lahan basah. Usaha ini cocok dilakukan di daerah pedesaan di

P. Jawa, mengingat perluasan areal lahan pertanian di P. Jawa sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan.

Memanfaatkan secara maksimal lahan yang telah ada, bukan berarti menguras daya produksi lahan tersebut sehabis-habisnya dengan mengorbankan keseimbangan lingkungan hidup. Yang diharapkan ialah adanya keterpaduan diantara keduanya, yakni meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi pemanfaatan lahan dengan tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan (pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan), sebagai salahsatu bentuk inovasi di bidang teknologi pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan di daerah pedesaan adalah mustahil dapat berhasil, tanpa pembangunan bidang manusianya, yakni penduduk pedesaan yang sebagian besar berstatus sebagai petani. Bahkan pembangunan terhadap penduduk pedesaan merupakan sasaran pertama dan yang utama (sentral) di dalam rangka pembangunan pedesaan secara keseluruhan.

Berbicara tentang pembangunan manusia, GBHN RI Tahun 1983 menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, diharapkan terdapatnya:

... keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional (Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR, 1983, h. 71).

Jadi inti daripada pembangunan adalah pembangunan manusia. Manusia adalah tujuan dan sekaligus pelaku dari pembangunan itu sendiri (Engkoswara, 1983, h. 26).

Pembangunan manusia menyangkut usaha pembentukan / perubahan sikap dan perilaku ke arah yang dikehendaki oleh dan yang mendorong pembangunan (yang bersifat positif). Dalam hal ini, maka usaha di bidang pendidikan sangat memegang peranan penting. Pendidikan boleh dikatakan kunci utama di dalam pembinaan sikap mental dan keterampilan warga masyarakat (Nursid Sumaatmadja, 1979, h. 16). Dengan melalui pendidikan diharapkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari kurang tahu menjadi tahu, dari kurang terampil menjadi terampil, dari sikap mental "nrimo" menjadi sikap yang lebih bertanggung jawab (W.P. Napitupulu, 1979, h. 29).

Dengan melalui usaha di bidang pendidikan diharapkan terciptanya manusia-manusia Indonesia yang taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang cerdas dan terampil, yang berbudi pekerti tinggi, yang berkepribadian kuat, tebal semangat kebangsaannya, cinta terhadap tanah airnya, sehingga diharapkan dapat tumbuhnya manusia-manusia pembangunan, yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1983, h. 113).

Jadi pembangunan pedesaan pada dasarnya menyangkut proses edukasi dalam rangka mengubah sikap dan perilaku warga desa ke arah pembukaan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhammadi Siswosoedarmo, 1979, h. 29).

Tentang pentingnya upaya pendidikan bagi kalangan

penduduk desa, Philip H. Combs & Manzoor Ahmed (1978, h. 3) menyatakan: "... that greater emphasis should henceforth be given to developing the rural areas of poor nations and that this would require, among other things, fresh approaches to meeting the educational needs of rural population."

Adapun macam pendidikan yang bisa diselenggarakan di daerah pedesaan, dapat berupa pendidikan formal dan dapat pula berupa pendidikan non-formal. Terutama bagi para petani di pedesaan, jenis pendidikan yang disebutkan terakhir yakni pendidikan non-formal, jauh lebih penting bila dibandingkan dengan jenis pendidikan formal, sehubungan dengan kondisi para petani itu sendiri. Model penyelenggaraannya antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, sebagai salahsatu bentuk dari proses difusi inovasi. GBHN RI Tahun 1983 dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut: "... Untuk menunjang pembangunan pertanian perlu diteruskan dan disempurnakan usaha penyuluhan dan pendidikan pertanian... serta penelitian dan pemilihan teknologi pertanian yang tepat, yang disebarakan ke seluruh daerah dan masyarakat petani." (Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR, 1983, h. 95).

Sudah tentu usaha pendidikan tadi memerlukan berbagai unsur penunjang, baik berupa pesan, saluran komunikasi, kelompok sasaran (klien), prasarana, metoda penyampaian maupun pendidik masyarakat yang bisa diandalkan, termasuk diantaranya para penyuluh lapangan selaku pembawa perubahan (agents of change).

Dalam hal ini, Maman Abdurachman (1980, h. 35) menjelaskan sebagai berikut :

Termasuk ke dalam faktor ekstern bagi terjadinya perubahan pada suatu masyarakat adalah orang-orang yang sengaja membawa pembaharuan dalam masyarakat. Orang-orang ini dikenal sebagai agents of change. Mereka berperan sebagai pemberi arah dan pembimbing teknis dalam rangka perubahan menuju sesuatu yang direncanakan. Tanpa orang-orang ini perubahan tidak akan berlangsung dengan tertib dan sulit mencapai apa yang diharapkan.

Orang yang berperan sebagai pembawa perubahan itu, dapat berstatus formal, berupa para petugas pemerintah, seperti PPL, PLKB ; tetapi tidak jarang pula mereka yang berstatus tidak formal (antara lain tokoh masyarakat) seperti yang terdapat di daerah penelitian.

B. Masalah yang Diteliti

Banyak usaha yang telah dan sedang dijalankan pihak pemerintah guna meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan, khususnya melalui jalur pendidikan luar sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan GBHN RI Tahun 1983 (Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR, 1983, h. 113) yang menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya dilaksanakan di dalam sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Pendidikan luar sekolah sebagai pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, akan terus dikembangkan dan diperluas dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang makin ditingkatkan.

Program-program pendidikan luar sekolah yang telah dan sedang dijalankan pemerintah lewat Direktorat Pendidikan Masyarakat (Departemen P dan K) selama Pelita III dan IV, di antaranya pendidikan dasar melalui Paket Kejar A, yang bertujuan memberantas sekaligus tiga kebutaan, yakni buta huruf Latin dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar ;

pendidikan usaha lewat Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha), yang bertujuan meningkatkan pendapatan warga belajar di bidang usaha.

Selain itu Departemen-departemen Pemerintahan lainnya, juga menyelenggarakan program-program pendidikan luar sekolah yang bertujuan relatif sama yakni ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya di daerah pedesaan, misalnya Departemen Pertanian menyelenggarakan program penyuluhan pertanian, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk di dalamnya persoalan pangan dan pelestarian lingkungan hidup, Departemen Penerangan menyajikan berbagai acara pendidikan kemasyarakatan melalui radio dan televisi antara lain dalam wujud "Siaran Pedesaan" dan "Ragam Desa" yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan Departemen Pertanian guna memantapkan penyuluhan yang diberikan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di lapangan (Sutaryat Trisnamansyah, 1986, h. 10).

Kemudian dalam rangka menerapkan kebijaksanaan Menteri KLH di bidang kependudukan dan lingkungan hidup (kemudahan penanganan masalah lingkungan hidup di Indonesia), maka sejak tahun 1978/ 1979 diadakan kerjasama antara Kantor Menteri Negara KLH (dulu PPLH) dengan Departemen P dan K, dalam bentuk pengembangan suatu jaringan penanganan masalah lingkungan hidup. Jaringan penanganan masalah lingkungan hidup tersebut meliputi tiga jalur yakni jaringan Pusat Studi Lingkungan Hidup (sekarang disebut Pusat Penelitian Lingkungan Hidup), Biro Bina

Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di depan Sidang DPR, 1983, h. 90).

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) dibangun di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sampai tahun 1984 /1985 telah terbentuk sebanyak 34 PPLH, masing-masing di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Malang, Surabaya, Jember, Samarinda, Pontianak, Banjarbaru, Denpasar, Ujungpandang, Ambon, Kupang dan Jayapura. Dari sekian banyak PPLH tersebut di atas, enam buah diantaranya, yakni PPLH-USU, PPLH-UI, PPLH-IPB, PPLH-ITB, PPLH-UNPAD dan PPLH-UNHAS, dikembangkan sebagai PPLH Pembina yang membina PPLH-PPLH lainnya.

PPLH diharapkan dapat memberikan masukan teknologi yang memadai dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mengingat:

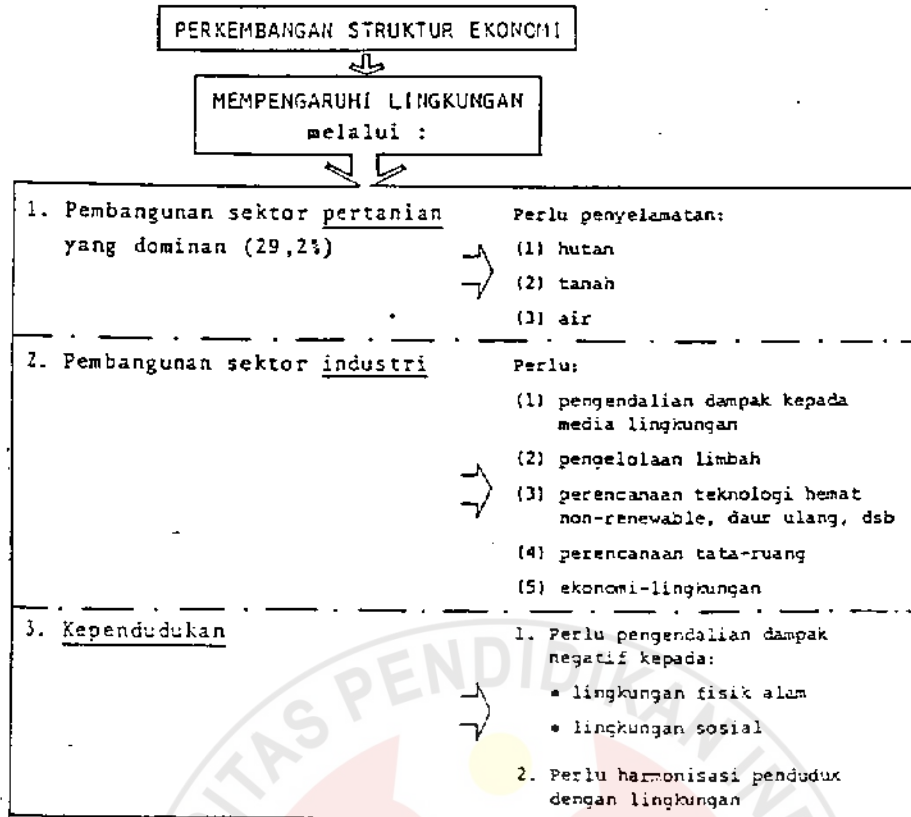
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), or the Center for Environmental Studies..., was formed... to carry out applied research and policy formulation on Indonesia socio-economic conditions and problems of growth that may have serious impact on the environment, resource utilization and human development. PPLH... is part of an Indonesian wide effort to protect the nation's ecosystem for human health and well-being; promote sustainable, self-supporting utilization and equitable distribution of resources; and improve human settlements. PPLH's tasks are to: (1) develop and foster increased understanding and expertise in environmental studies (2) produce material for formulating sound environmental management policies (3) formulate operational guidelines for environmental controls (4) bridge the gap between policy planning and implementation (Brosur PPLH-ITB, 1985, h. 1).

Untuk mencapai tujuan dan untuk merealisasikan tugasnya tadi, PPLH menyelenggarakan berbagai penelitian, pendidikan dan

diseminasi (dissemination)/ penyebaran informasi tentang cara-cara mengelola dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah kritis atau yang berkualitas lingkungan rendah.

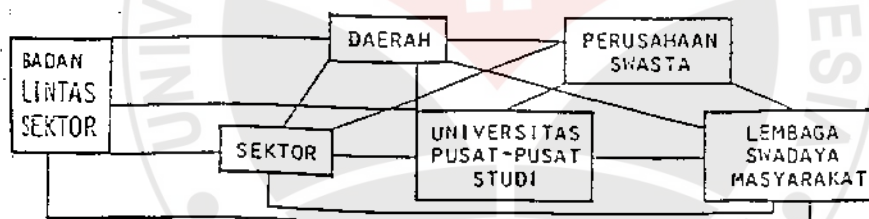
Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang berada di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I dan Bappeda, diharapkan dapat mengatur dan mengelola pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan kegiatan lintas sektor. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menurut UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mustadji, 1983, h. 3, 7, 18) merupakan organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, bagi mereka yang berminat dalam pengelolaan lingkungan hidup. LSM berperan sebagai penunjang dan sarana mekanisme kontrol sosial yang dapat mendorong segenap kegiatan pembangunan untuk berwawasan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 1984, h. 349). LSM sifatnya non-formal, sedangkan PPLH dan BEKLIH sifatnya formal. Tentang kaitan antara ketiga lembaga tadi, dapat dilihat dari bagan (Gambar 1).

Sebagai lembaga penelitian dan pendidikan di bidang lingkungan hidup, PPLH memiliki beberapa obyek sebagai sasaran dari bidang kerjanya, termasuk PPLH-ITB di Bandung. Salahsatu obyek penelitian dan pendidikan lingkungan PPLH-ITB ialah kampung Cigaru, yang termasuk wilayah desa Mekarsari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis (Mengenai data geografis dari kampung tersebut secara terperinci, akan diuraikan pada Bab IV). Kampung



↓

Untuk mewujudkan ini diperlukan kegiatan berencana :



↓

Ditunjang oleh kerjasama dalam :

1. pendidikan dan latihan
2. penelitian dan pengembangan
3. komunikasi - informasi
4. peraturan - perundangan-undangan
5. kerjasama luar negeri
6. proyek percontohan

Gb. 1. Kebijakan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Menteri KLH, 1984, h. 5, 6)

↓

Yang hasilnya dapat dinilai melalui tolok ukur: Kualitas Lingkungan, Kualitas Hidup

tersebut dijadikan obyek penelitian dan pendidikan PPLH-ITB sejak tahun 1981.

Sebagai obyek penelitian dan pendidikan PPLH-ITB, maka masukan utama inovasi yang diperkenalkan kepada penduduk Cigaru adalah intensifikasi pemanfaatan lahan kering yang berwawasan lingkungan.

Mengapa Cigaru dipilih sebagai salahsatu obyek penelitian dan pendidikan PPLH-ITB dengan masukan utama sebagaimana disebutkan di atas ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita berpaling ke masa-masa sebelum daerah tersebut dijadikan obyek penelitian dan pendidikan PPLH-ITB.

Sampai dengan tahun 1980, kondisi fisis dan psiko-sosial-ekonomi kampung Cigaru cukup memprihatinkan. Keadaan tanah, khususnya lahan kering, dalam keadaan rusak, tidak produktif, disebabkan proses erosi yang berlangsung lama dan cukup parah. Akibat dari keadaan tersebut, selain produksi pertanian menurun, juga keseimbangan lingkungan terancam. Sistem pemukiman dan perumahan penduduk tidak teratur, sehingga tingkat kesehatan penduduk rendah. Proses komunikasi antara penduduk dengan pihak luar tidak lancar, karena letak kampung yang relatif terisolir.

Berkaitan dengan semua hal tadi, maka penduduk kampung tersebut pada umumnya miskin, lugu, pasif (daya kreatif, inisiatif dan motif berprestasinya rendah) dan tingkat pendidikannya rendah. Khusus terhadap usaha intensifikasi pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan hidup, penduduk

bersifat masa-bodoh, bahkan ada kecenderungan menjurus pada melakukan tindakan merusak lingkungan.

Kondisi-kondisi tersebut di atas telah mendorong PPLH-ITB untuk memilih kampung Cigaru sebagai obyek penelitian dan pendidikan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan bahwa ketimpangan lingkungan penyebab utamanya adalah karena sikap dan perilaku penduduk yang salah (negatif) terhadap lingkungannya, maka PPLH-ITB mengambil kebijaksanaan untuk terlebih dahulu membina sikap dan perilaku penduduk (termasuk penduduk kampung Cigaru), sesudah itu baru aspek-aspek lainnya.

Guna membimbing penduduk kampung Cigaru bagi terbentuknya sikap dan perilaku mereka ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup, telah bertugas sejumlah penyuluh lapangan selaku agen perubahan, yang terdiri dari seorang penyuluh lapangan utama dan beberapa orang penyuluh lapangan pembantu, yang bernaung di bawah Yayasan Bina Lingkungan Hidup (YBLH). Yayasan Bina Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup, yang pada prinsipnya merupakan lembaga pelaksana di lapangan dari program PPLH. Adapun YBLH yang bertugas membimbing dan membina penduduk kampung Cigaru sebagaimana telah disebutkan di atas tidak lain adalah YBLH-Ciamis.

Sehubungan dengan adanya usaha tersebut di atas, penulis mencoba untuk meneliti : sampai sejauh mana peranan

yang dijalankan agen perubahan tadi dalam pembentukan sikap dan perilaku penduduk kampung Cigaru ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup?

Untuk memperoleh jawaban terhadap masalah penelitian tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan latar belakang kehidupan dan kepribadian agen perubahan yang bertugas di daerah penelitian tersebut?

2. Materi penyuluhan apa yang disampaikan agen perubahan tadi terhadap penduduk daerah penelitian?

3. Cara-cara apa yang ditempuh agen perubahan tersebut guna mendorong penduduk daerah penelitian untuk mengadopsi inovasi teknologi pertanian lahan kering yang berwawasan lingkungan serta untuk mempercepat adopsi tersebut?

4. Bagaimana persepsi penduduk daerah penelitian tentang kepribadian dan penampilan agen perubahan tadi dan bagaimana hubungan persepsi tersebut dengan sikap dan perilaku mereka ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup?

5. Apakah terdapat perbedaan perilaku penduduk daerah penelitian dalam hal intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup antara sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan dari agen perubahan tadi?

C. Penjelasan Istilah dan Pembatasan Masalah

1. Penjelasan Istilah

Dalam judul maupun masalah penelitian, terkandung

beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan. Istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan diantaranya:

a. Peranan, dimaksudkan adalah perilaku yang dipertunjukkan agen perubahan dalam pembentukan sikap dan perilaku penduduk Cigaru ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup.

b. Agen perubahan adalah seseorang yang bertugas mempengaruhi keputusan inovasi dari kliennya ke arah yang dikehendaki oleh suatu lembaga perubahan.

c. Sikap adalah disposisi atau kesiapan mental seseorang untuk bereaksi atau bertindak terhadap lingkungannya atau suatu obyek tertentu.

d. Persepsi adalah proses, baik melalui penginderaan maupun melalui memori, imajinasi, dan fantasi yang menjadikan individu sadar, memahami dan memberi makna terhadap dunia lingkungannya yang berupa obyek sosial dan obyek fisik yang berfungsi sebagai stimulus bagi individu tersebut.

e. Perilaku adalah perbuatan atau tindakan seseorang sebagai pencerminan dari sikapnya.

f. Kepribadian adalah organisasi dinamis sistem psiko-fisik seseorang, yang menentukan karakteristik perilakunya.

g. Intensifikasi pemanfaatan lahan kering adalah usaha peningkatan produksi pertanian lahan darat, dengan cara mendayagunakan lahan yang telah ada melalui teknologi pertanian yang lebih modern.

h. Pelestarian lingkungan hidup adalah usaha memelihara

lingkungan hidup agar tetap dalam keadaan serasi dan seimbang, sehingga tercapai kehidupan yang optimal. Lingkungan hidup itu sendiri diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Pembatasan Masalah

Aspek-aspek yang menyangkut peranan agen perubahan, lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup cukup luas. Namun yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini mencakup karakteristik kepribadian yang meliputi: keramahan, ketegasan, ketabahan, kegigihan, kejujuran, ketekunan, kreatifitas, empati, keahlian dan penampilan agen perubahan dalam proses penyuluhan yang meliputi: cara memilih materi penyuluhan, cara mengaktifkan klien, cara pengambilan keputusan, cara memilih metoda penyampaian, media, frekuensi, waktu dan tempat penyuluhan, cara penggunaan bahasa dan kaidah agama, cara memotivasi klien, cara pembimbingan/ monitoring dan cara-cara pendekatannya terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat; sedangkan lahan kering di sini terutama tertuju pada tegalan dan pekarangan dan pelestarian lingkungan hidup terutama terfokus pada usaha konservasi tanah dan air.

D. Alasan Pemilihan Masalah

Masalah yang menyangkut peranan agen perubahan dalam pembentukan sikap dan perilaku penduduk (pedesaan) ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan

hidup, adalah tepat dibahas dan dianalisis berdasarkan tinjauan Pendidikan Luar Sekolah, dengan alasan:

1. Pendidikan Luar Sekolah dan pendidikan pada umumnya, senantiasa menyangkut upaya pembentukan dan perubahan sikap dan perilaku individu, kelompok ataupun masyarakat ke arah yang dikehendaki, yang positif.

2. Penduduk pedesaan dan golongan petani merupakan sasaran PLS yang mendapat prioritas pertama ditinjau dari segi lingkungan sosial-budaya dan matapecaharian.

3. Sumber belajar, termasuk di dalamnya agen perubahan, merupakan salahsatu faktor penentu tingkat keberhasilan program pendidikan luar sekolah.

4. Kebutuhan akan pangan dan lingkungan yang lestari, merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk pedesaan. Karena itu pemilihan obyek sikap/perilaku tersebut adalah sejalan dengan asas kebutuhan dari PLS.

Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan:

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang, terutama yang berkecimpung dalam urusan pembangunan masyarakat desa, dalam menentukan para petugas yang akan menangani masalah yang ada di daerah pedesaan.

2. Dapat dijadikan pedoman bagi para penyuluh lapangan (selaku agen perubahan) di daerah pedesaan dalam memberikan penyuluhan kepada penduduk pedesaan.

3. Dapat menjadi masukan baru (karena sepengetahuan penulis masalah ini belum ada yang membahasnya berdasarkan

tinjauan PLS) dan oleh karena itu diharapkan dapat memperkaya teori di dalam pendidikan luar sekolah.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sampai sejauh mana peranan yang dijalankan seorang agen perubahan selaku penyuluh lapangan dari YBLH-Ciamis dalam pembentukan sikap dan perilaku penduduk kampung Cigaru ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup.

Kalau tujuan penelitian tadi dijabarkan lagi, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui:

1. Keadaan latar belakang kehidupan dan kepribadian agen perubahan yang bertugas di daerah penelitian tersebut.
2. Materi penyuluhan yang disampaikan agen perubahan tadi terhadap penduduk daerah penelitian.
3. Cara-cara yang ditempuh agen perubahan tadi guna mendorong penduduk daerah penelitian untuk mengadopsi inovasi teknologi pertanian lahan kering yang berwawasan lingkungan serta untuk mempercepat adopsi inovasi tersebut.
4. Persepsi penduduk daerah penelitian tentang kepribadian dan penampilan agen perubahan tadi dan hubungannya dengan sikap dan perilakunya ke arah intensifikasi pemanfaatan lahan kering dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Ada tidaknya perubahan perilaku penduduk daerah penelitian tadi, sesudah adanya penyuluhan dari penyuluh tsb.